

**PEMBERDAYAAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN  
PERKEMBANGAN UMKM DI DESA SAMBI BULU**

**Ferdinand Esa Ramadhan**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[ferdinandesaramadhan@gmail.com](mailto:ferdinandesaramadhan@gmail.com)

**Dida Rahmadanik**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[didarahma@untag-sby.ac.id](mailto:didarahma@untag-sby.ac.id)

**Adi Susanto**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[adisusiantoro@untag-sby.ac.id](mailto:adisusiantoro@untag-sby.ac.id)

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) "Sambi Madu" in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises in Sambi Bulu Village, Taman District, Sidoarjo Regency. UMKM in this village have great potential in the fields of culinary, arts, and traditional health, but still face a number of obstacles such as limited capital, business management, and market access. BUMDes as a village economic institution is expected to be able to drive local economic development and a strategic partner in developing UMKM. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observations, documentation, and literature studies. The theory used is the ACTORS empowerment model by Cook and Macaulay, which includes six indicators: Authority, Confidence and Competence, Trust, Opportunities, Responsibilities, and Support. The results of the study show that BUMDes Sambi Madu has contributed to the development of UMKM through training, marketing facilitation, and partnerships with various parties. However, there is still inequality in access to benefits for some UMKM actors, especially due to limited program reach and BUMDes managerial capacity.

**Keyword:** *BUMDes, UMKM, Empowerment, Local Economy, Sambi Bulu Village*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Sambi Madu" dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Sambi Bulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. UMKM di desa ini memiliki potensi besar dalam bidang kuliner, kesenian, dan

kesehatan tradisional, namun masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan modal, manajemen usaha, dan akses pasar. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa diharapkan mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi lokal dan mitra strategis dalam pengembangan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Teori yang digunakan adalah model pemberdayaan ACTORS oleh Cook dan Macaulay, yang mencakup enam indikator: Authority, Confidence and Competence, Trust, Opportunities, Responsibilities, dan Support. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Sambi Madu telah berkontribusi dalam pembinaan UMKM melalui pelatihan, fasilitasi pemasaran, serta kemitraan dengan berbagai pihak. Namun, masih ditemukan ketimpangan dalam akses manfaat bagi sebagian pelaku UMKM, terutama karena keterbatasan jangkauan program dan kapasitas manajerial BUMDes.

**Kata Kunci:** *BUMDes, UMKM, Pemberdayaan, Ekonomi Lokal, Desa Sambi Bulu*

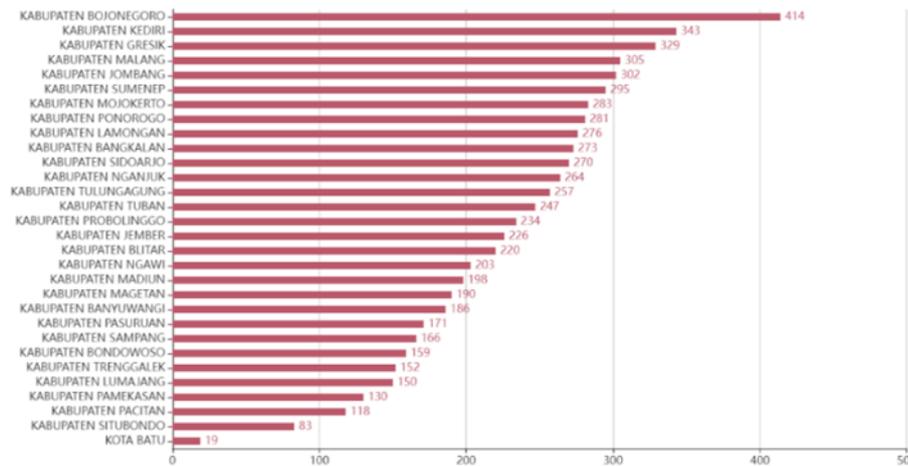
## **A. PENDAHULUAN**

Pengembangan Desa adalah menempatkan desa sebagai sasaran Pembangunan progsrif, yang memiliki tujuan untuk memajukan kondisi wilayah serta mengurangi berbagai kesenjangan yang terjadi dalam Masyarakat itu sendiri. Dalam hal sumber daya manusia, Saat ini desa masih dipandang cukup jauh dari kesejahteraan, akses kehidupan, ekonomi, hingga teknologi. Oleh karena itu, Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional (Baharuddin et al., 2023).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Sulaksana & Nuryanti, 2019). Dari adanya BUMDes hal ini menajadikan sebuah instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga membawa dampak terhadap peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal (Adawiyah, 2018).

Di Provinsi Jawa Timur, inisiatif pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal telah dirancang secara komprehensif sejak dikeluarkannya regulasi terkait. Hampir setiap kabupaten di wilayah tersebut telah memiliki proyek percontohan BUMDes yang berfungsi sebagai model pengembangan ekonomi pedesaan. Saat ini terdapat sebanyak 6.744 BUMDes yang telah berkebang diwilayah jawa timur, Dimana hal ini dapat Memotivasi dan menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan Masyarakat khususnya yang ada di jawa timur. Tabel dibawah ini mengungkapkan jumlah BUMDes yang ada di jawa timur dari berbagai wilayah pada tahun 2024.

Tabel 1.1 Data BUMDes Yang Ada di Jawa Timur Tahun 2024



Sumber: Data Desa Center DPMD JATIM

Berdasarkan data yang ditampilkan pada gambar, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 mencapai 6.477 unit. Data tersebut menggambarkan perkembangan signifikan dalam pembangunan desa di Jawa Timur, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kemandirian ekonomi desa melalui pendirian dan pengelolaan BUMDes. Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi 18 Kecamatan, 322 Desa, dan 31 Kelurahan. Namun, tidak semua Desa mempunyai BUMDes. Pada Tahun 2019 jumlah BUMDes di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 139, Tahun 2020 sebanyak 179, dan Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 194 BUMDes. Hal tersebut dikarenakan adanya penerapan Kebijakan BUMDes di Kabupaten Sidoarjo yang membuat Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Desa untuk mendirikan BUMDes pada setiap Desanya. Pendirian BUMDes di Kabupaten Sidoarjo berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 4 tahun 2009 mengenai prosedur Pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang sekarang digantikan No. 15 Tahun 2019 mengenai Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes

Pada tahun 2021, Desa Sambibulu masuk dalam nominasi Lomba Desa se-Jawa Timur. Inovasi dari Kepala Desa Sambibulu dimulai dari pendirian BUMDes pada tahun 2018, yaitu BUMDes Sambi Madu. Program pertamanya yaitu pasar desa di Dusun Sambisari, dekat Agro Wisata dengan menelan biaya 100 juta yang telah membangun 23 stand dengan luas pasar hamper 300 meter. Kemudian Desa Sambibulu memperoleh hadiah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur berupa uang tunai Rp. 25 juta yang masuk ke rekening desa tersebut.

Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022 menunjukkan Kecamatan Taman memiliki total 10.487 UMKM yang tersebar di berbagai desa. Hal ini didasarkan pada data 25 desa yang tercatat di Kecamatan Taman. Salah satu desa dengan jumlah UMKM yang cukup signifikan adalah Desa Sambibulu, yang menempati posisi keempat dengan 835 UMKM.

Di Desa Sambibulu, mayoritas UMKM bergerak di bidang kuliner, kesenian, dan kesehatan tradisional. Pada UMKM bidang kuliner umumnya memproduksi makanan tradisional, kue basah, dan beberapa minuman yang dijual secara langsung maupun melalui pemesanan. Pada sektor kesenian, didominasi oleh kerajinan tangan dalam bentuk cinderamata. Sementara itu, pada bidang kesehatan tradisional beberapa pelaku UMKM memproduksi jamu dan ramuan herbal dari bahan-bahan alami sebagai upaya pelestarian warisan leluhur. Ketiga bidang ini tidak hanya menjadi pencaharian utama, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang ters dilestarikan oleh masyarakat Sambibulu.

Korelasi antara BUMDes dan UMKM seharusnya bersifat saling mendukung dalam membangun perekonomian desa. BUMDes idealnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu memberikan dukungan nyata bagi pertumbuhan UMKM melalui fasilitas permodalan, pelatihan, hingga perluasan akses pasar. Dalam konteks ini, keberadaan BUMDes dapat memperkuat fondasi usaha masyarakat desa agar mampu bersaing secara berkelanjutan. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Desa Sambibulu, tampak adanya ketimpangan dalam relasi antara BUMDes dan UMKM yang ada. Meskipun BUMDes di desa tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dengan berbagai unit usaha yang berhasil dikelola secara profesional, kondisi tersebut belum selaras dengan perkembangan UMKM lokal yang cenderung stagnan. Banyak pelaku UMKM yang belum merasakan manfaat langsung dari keberadaan BUMDes, baik dalam bentuk pendampingan usaha, akses permodalan, maupun peluang kolaborasi.

UMKM di Desa Sambibulu masih belum berjalan maksimal. Dimana hal ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan manajemen dan pemasaran, terbatasnya akses pasar, serta rendahnya kualitas produk yang dihasilkan. Namun BUMDes yang seharusnya menjadi penggerak utama pemberdayaan UMKM, belum memainkan perannya secara optimal, baik dalam hal memberikan dukungan maupun membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara BUMDes dengan pemangku kepentingan UMKM. Salah satu faktor penghambat dalam perkembangan UMKM di Desa Sambi Bulu adalah minimnya perhatian dan dukungan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes hendaknya berperan sebagai lembaga yang mengembangkan perekonomian desa dengan mengelola dan mendukung pengembangan UMKM. Dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan, banyak BUMDes di desa ini yang belum mampu memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung UMKM, baik dari segi fasilitas, pelatihan, maupun dana untuk membantu para pemilik kepentingan UMKM mengatasi permasalahan yang mereka hadapi (File PETRA di WA)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Moch Achsin Ja'far terhadap salah satu UMKM di desa Sambi Bulu ditemukan sebuah permasalahan terkait dengan pemasaran dan promosi yang kurang meluas sehingga UMKM tersebut tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini terjadi pada kasus UMKM Jamu yang dilakukan oleh Ibu Miati salah satu pelaku usaha UMKM yang bergerak di bidang minuman jamu tradisional dimana ia menjalankan usaha ini karena ketersediaan bahan baku yang cukup banyak di lingkungan sekitar rumah. yang mana beliau menjual produk tersebut hanya di sekitar lingkungan rumahnya saja. sehingga usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan maksimal akibat kurangnya promosi yang

dilakukan, padahal di era yang digital saat ini cukup terbilang mudah untuk memasarkan produk melalui sosial media.

Dalam situasi tersebut, diperlukan upaya pengembangan ekonomi daerah yang lebih intensif dengan memaksimalkan peran BUMDes dalam mendukung UMKM desa. Pengembangan ekonomi lokal oleh BUMDes untuk memperkuat UMKM di Desa Sambi Bulu tidak hanya akan memperkuat sektor UMKM tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh desa, Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan pengembangan ekonomi lokal melalui optimalisasi peran BUMDes dalam penguatan usaha kecil dan menengah di Desa Sambi Bulu.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam bagaimana peran serta strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes Sambi Madu terhadap perkembangan UMKM di Desa Sambi Bulu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendalanya. Penelitian dilakukan di Desa Sambi Bulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori ACTORS yang dikembangkan oleh Cook dan Macaulay sebagai kerangka konseptual pemberdayaan masyarakat. Teori ini terdiri dari enam indikator utama, yaitu Authority, Confidence and Competence, Trust, Opportunities, Responsibilities, dan Support.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Authority (Wewenang)**

Wewenang (Authority) dalam teori yang dikemukakan oleh Cook dan Macaulay mengacu pada kemampuan yang dipegang oleh pemangku kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terlebih lanjut wewenang dapat diukur sejauh mana para pemangku kebijakan dan program dapat berkontribusi secara signifikan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Dari wawancara yang dihasilkan, pada indikator wewenang terlihat pemerintah desa sambibulu memberikan kewenangan yang luas terhadap bumdes untuk menjalankan dan mengembangkan programnya kepada UMKM yang sesuai dengan standart dan aturan yang telah ditetapkan. BUMDes diberikan kewenangan dalam berbagai sikap dalam mengambil Keputusan secara teknis, Menyusun program kerja, dan mengelola sumber daya yang telah ada dan yang telah disediakan. Namun dibalik itu semua BUMDes pun harus tetap tunduk dan patuh kepada peraturan desa yang menjadi acuan bumdes dalam melaksanakan kegiatannya dan melaporkan segala bentuk programnya kepada pemerintah desa untuk dipantau dan diamati.

Para pelaku UMKM juga mengakui peran BUMDes cukup besar dalam Upaya mengembangkan wirasauaha mereka, selain itu pula banyak kebijakan yang

diambil oleh BUMDes langsung dapat mereka rasakan dan berdampak langsung ke wirasausaha mereka, seperti halnya pelatihan, pendampingan, modal dan juga pasar. Kewenangan yang diberikan oleh bumdes kepada pelaku UMKM mencerminkan sebuah kepercayaan yang sehat oleh masyarakat kepada pemerintah desa dan juga bumdes, sehingga hal ini memungkinkan tercitanya sebuah kebijakan ekonomi desa yang relevan dan tepat sasaran. Dimana kewenangan yang jelas dan akuntabel serta adanya kolaboratif menjadi landasan penting dalam menciptakan program pemberdayaan UMKM yang efektif.

## **2. Confidence and Competence (Kepercayaan Diri dan Kompetensi)**

Kepercayaan diri dan kompetensi (Confidence and competence) dalam teori yang dikemukakan oleh Cook dan Macaulay mengacu pada kemampuan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang didasarkan oleh sebuah kompetensi para pelaksana kebijakan secara baik dan optimal, hal ini berarti mencapai hasil yang maksimal dengan di latar belakang oleh kepercayaan diri dan kemampuan seseorang dalam menerima dan menjalankan kebijakan yang telah diberikan. Dengan meningkatkan sebuah kepercayaan diri dan kompetensi antara BUMDes dan para pelaku UMKM kita dapat menilai sebuah kolaborasi yang sejauh mana kebijakan tersebut berhasil membawa program yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Sebuah kepercayaan yang diberikan kepada BUMDes berasal dari bukti nyata keberhasilan program program yang sudah dijalankan oleh BUMDes dilapangan. Pemerintah desa sambibulu melihat bahwa BUMDes mampu menunjukkan kepercayaan dirinya dalam dalam pelaksanaan program melalui pengelolaan yang baik dan transparan. Selain itu, pemerintah desa juga mengukur keberhasilan bumdes dalam memberikan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, serta kemampuan bumdes dalam menyusun rencana kerja yang adaptif.

Kolaborasi pun tampak sangat nyata, hal ini dilihat dari dukungan UMKM yang merespon dengan sangat positif dan antusias yang cukup tinggi, mengingat mereka tidak hanya mendapatkan bantuan modal usaha saja melainkan juga mereka mendapatkan pelatihan teknis yang bermanfaat bagi mereka dalam menjalankan wirausahanya dari pihak BUMDes. Dari proses tersebut memperlihatkan bahwa berdasarkan asumsi yang dikemukakan menunjukkan bahwa kepercayaan Masyarakat terhadap bumdes cukup tinggi sehingga antara kepercayaan dan kompetensi diri saling menguatkan dan menjadi factor penting dalam keberhasilan pemberdayaan BUMDes terhadap UMKM di wilayahnya.

## **3. Trust (Kepercayaan)**

Trust (kepercayaan) dalam teori yang di kemukaan oleh macaulay and cook menekankan sebuah keterbukaan dan transparansi para pemangku kebijakan terhadap masyarakat sebagai pelaksana kegiatan. Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah pelaku UMKM yang menjadi mitra BUMDes dalam menjalani program. Dalam pelaksanaannya indikator ini sangat penting sekali untuk menjaga kestabilan kerjasama antara dua belah pihak. dalam konteks penelitian, indikator kepercayaan (trust) menjadi tolak ukur sebuah organisasi untuk menilai sejauh mana mereka dapat memenuhi kepercayaan para pelaksana kegiatan.

BUMDes Desa sambibulu telah membangun kepercayaan sosial melalui keterbukaan dan meterlibatan masyarakat dalam setiap proses dan pelaksanaannya.

Khususnya setiap program kegiatan dan penggunaan anggaran, hal ini dilaporkan secara rutin dan berkala kepada pemerintah desa dan media masyarakat melalui papan informasi desa secara rinci dan akurat. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes bahwasannya tidak hanya sebagai pelaksana program mereka, melainkan mitra terpercaya bagi UMKM desa sambibulu.

Para pelaku UMKM pun juga merasa dilibatkan disetiap kegiatan rancangan program, hal ini dinilai bahwa mereka tidak hanya sebagai mitra penerima manfaat semata tetapi juga bagian dari proses perjalanan dan pengembangan program yang akan dijalankan. Selain itu kepercayaan masyarakat luas terhadap tidak hanya memperkuat keberadaan BUMDes, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program.

#### **4. Opportunity (Peluang)**

Opportunity (kesempatan) dalam teori yang dikemukakan oleh Macaulay dan Cook merujuk pada adanya peluang yang diberikan kepada masyarakat untuk berkembang, khususnya melalui program pemberdayaan yang dijalankan oleh BUMDes. Kesempatan ini mencakup akses terhadap sumber daya, pelatihan, jaringan pemasaran, serta dukungan kelembagaan yang memungkinkan pelaku UMKM sebagai mitra BUMDes dapat meningkatkan kapasitas usaha mereka. Dalam konteks penelitian ini, indikator opportunity menjadi salah satu tolak ukur penting untuk menilai sejauh mana BUMDes mampu menciptakan ruang pertumbuhan yang nyata dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan menyoroti bahwa pentingnya BUMDes dapat melihat peluang untuk dijadikan sebagai acuan dasar dalam menciptakan ekosistem baru bagi UMKM. Melalui program pelatihan serta fasilitas usaha yang telah diberikan, BUMDes berharap mampu berkolaborasi kepada pelaku UMKM untuk memanfaatkan peluang tersebut. Selain itu juga pemerintah desa turut mengambil peran dalam membuka jaringan kerja sama dengan lembaga eksternal, sehingga hal ini dapat menjadi peluang yang potensial untuk melanjutkan UMKM yang berkelanjutan kedepannya. Para pelaku UMKM merasakan peluang tersebut melalui peningkatan jumlah pelanggan yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan BUMDes tidak hanya berorientasi pada pemberian modal semata melainkan juga ada ruang lain untuk menciptakan program yang berkelanjutan.

#### **5. Responsibility (Tanggung Jawab)**

Responsibility (tanggung jawab) dalam teori yang dikemukakan oleh Macaulay dan Cook menekankan pentingnya kejelasan peran dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan suatu program. Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku bagi pihak BUMDes sebagai pelaksana utama program pemberdayaan, tetapi juga bagi pelaku UMKM sebagai mitra yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha. Dalam konteks pemberdayaan, responsibility diukur dengan melihat sejauh mana BUMDes bertanggung jawab masalah yang terjadi, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap peran yang telah disepakati dalam kerangka pemberdayaan UMKM Desa Sambibulu.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BUMDes dan pemerintah desa terus memperkuat komitmen mereka dalam pendampingan terhadap UMKM dalam waktu yang panjang. Ketika ditemukan sebuah kendala pada program UMKM, mereka secara langsung untuk turun tangan dalam mengkaji dan menemukan solusi. Dari hal tersebut mencerminkan adanya sebuah tanggung jawab yang kolektif dalam proses pelaksanaan programnya.

Para pelaku UMKM pun merasa di dampingi dan diayomi secara penuh oleh mereka. Karena, melalui indikator ini mereka para pelaku UMKM menilai bahwa mereka tidak merasa sendiri dalam memegang tanggung jawabnya, melainkan diberikan rasa aman dalam mengelola usahanya. Dengan adanya sistem monitoring secara langsung yang dilakukan secara berkala menjadi bukti bahwa BUMDes tidak sekedar menjalankan program, tetapi juga bertanggung jawab kepada setiap program baik dari segi hasil dan dampaknya.

#### **6. Support (Dukungan)**

Support (dukungan) dalam teori yang dikemukakan oleh Macaulay dan Cook merujuk pada sejauh mana para pemangku kebijakan memberikan bantuan nyata, baik secara moral, material, maupun administratif kepada masyarakat sebagai pelaksana kegiatan. Dalam pelaksanaan program di Desa Sambibulu, indikator ini menjadi aspek penting yang menentukan keberlanjutan dan efektivitas hubungan antara BUMDes dan pelaku UMKM, karena tanpa adanya dukungan yang konsisten, program pemberdayaan berisiko mengalami stagnasi bahkan kegagalan.

Dari hasil wawancara dari berbagi narasumber terkait, menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan kepada pelaku UMKM mencakup berbagai macam aspek. Dimana hal tersebut mencakup bantuan modal modal, pelatihan dan pengembangan potensi secara gratis yang diadakan diwaktu tertentu, hingga dengan pengetahuan terkait dengan promosi melalui digital. Pemerintah desa sambibulu dan juga BUMDes berperan penting dalam menyediakan fasilitas mulai dari fasilitas tempat usaha serta kesempatan pelatihan bersama. Melalui pendekatan yang bersifat personal, setiap UMKM dilakukan pendataan dalam pemetaannya untuk diberikan program yang sesuai dengan kompetensinya.

UMKM merasa dihargai karena bantuan yang diberikan tidak bersifat seragam, tetapi bersifat adaptif sesuai dengan tantangan di setiap masing masing usaha, hal ini menunjukkan adanya sebuah dorongan yang kuat baik dari BUMDes dan pemerintah desa untuk menjadikan UMKM desa sambibuli ssbagai pilar penggerak perputaran ekonomi yang yang telah ditetap didalam program kerjanya

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Sambi Madu telah menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pengembangan UMKM di Desa Sambi Bulu. Melalui program pelatihan, pendampingan usaha, akses permodalan, serta promosi produk, sebagian besar pelaku UMKM merasakan manfaat langsung dalam peningkatan kapasitas usaha mereka. Keberhasilan ini didukung oleh kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait keterbatasan SDM pelaku UMKM, rendahnya literasi digital, serta kurangnya inovasi produk.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar BUMDes memperkuat kolaborasi dengan pihak eksternal, meningkatkan kapasitas SDM baik pengelola maupun pelaku UMKM, serta menerapkan sistem monitoring dan evaluasi program secara berkala. Selain itu, penyusunan roadmap pemberdayaan UMKM desa secara terstruktur juga diperlukan sebagai pedoman pengembangan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adawiyah, R. (2018). Strategi Pengembangan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Media Sosial. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1.
- Afriansyah. (2023). Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. In *Pemberdayaan Masyarakat*.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Baharuddin, M. I., Sabua, E. S., & Hanisa, N. (2023). Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Padang Kalua. *Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.32528/mujtama.v3i1.8705>
- Amalia, F., Sinaga, R., Asyari, Soeyatno, RF., Silitong, D., Solikin, A., Hubbansyah, AK., Siregar, RT., Maulina, D., Kusumaningrum, Sahamony, NF., Litriani, E., & Ladjin, N. (2022). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Michael P. dan Smith, S. T. (2011). *Pembangunan Ekonomi*.
- Sarjana, S., Susandini, A., & Azmi, Z. (2021). Manajemen UMKM. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. <http://repository.usahid.ac.id/2296/1/22-11-77-EBOOK-Manajemen-UMKM.pdf>
- Suaib. (2023). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. In *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB-2.pdf>
- Sulaksana, J., & Nuryanti, I. (2019). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kasus Di Bumdes Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(2), 348–359. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.02.11>
- Yunita, K., Mustika, I. G., Rusmita, S., Prihartini, D., & Mustakim, U. (2019). Konsep Pendirian dan Pengembangan Bumdes. *Prosiding SATIESP 2019*, 171–177.